

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	6
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	15
<b>BAB III</b>	16
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	16
3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	16
3.1.1 Pendapatan - LRA	16
3.1.2 Belanja	16
3.1.3 Pendapatan - LO	20
3.1.4 Beban	20
3.1.5 Aset	21
3.1.6 Kewajiban	28
3.1.7 Ekuitas Dana	31
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua pada SKPD	31
<b>BAB IV</b>	32
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	32
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas

sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- |         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| BAB I   | : PENDAHULUAN                               |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD  |

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN SKPD  
BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran tahun 2024 dijelaskan pada bab ini. Pada Tahun Anggaran 2024 dalam APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35.183.499.721,00. Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>35.351.707.885,00</b>	<b>35.183.499.721,00</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>35.351.707.885,00</b>	<b>34.487.729.721,00</b>
<b>5101</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.064.590.885,00</b>	<b>2.771.940.726,00</b>
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.828.885,00	1.618.228.726,00
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.131.312.000,00	1.151.312.000,00
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.450.000,00	2.400.000,00
<b>5102</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.610.910.150,00</b>	<b>2.010.767.150,00</b>
510201	Belanja Barang	552.539.650,00	543.332.550,00
510202	Belanja Jasa	871.706.500,00	1.130.208.700,00
510203	Belanja Pemeliharaan	13.925.000,00	13.925.000,00
510204	Belanja Perjalanan Dinas	158.489.000,00	309.050.900,00
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00

	untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
<b>5105</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>29.676.206.850,00</b>	<b>29.705.021.845,00</b>
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.539.519.000,00	28.539.519.000,00
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.165.502.845,00
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>693.577.000,00</b>	<b>695.770.000,00</b>
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>693.577.000,00</b>	695.770.000,00
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.557.000,00	26.750.000,00
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.498.000,00	11.498.000,00
520210	Belanja Modal Komputer	657.522.000,00	657.522.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>35.351.707.885,00</b>	<b>35.183.499.721,00</b>

Pada tahun 2024, ada pengurangan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 861.785.164,00). Pengurangan dan penambahan anggaran tersebut terbagi dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar (Rp 1.292.650.159,00)
2. Belanja barang jasa sebesar Rp 399.857.000,00
3. Belanja hibah sebesar Rp 28.814.995,00
4. Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 695.770.000,00

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang merupakan ukuran kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 ditampilkan dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Anggaran Perubahan</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>
5	BELANJA DAERAH	<b>35.183.499.721,00</b>	<b>35.072.474.457,00</b>	99,68
51	BELANJA OPERASI	<b>34.487.729.721,00</b>	<b>34.385.735.457,00</b>	99,70
5101	Belanja Pegawai	<b>2.771.940.726,00</b>	<b>2.729.124.210,00</b>	98,46
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.618.228.726,00	1.596.828.127,00	98,68
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.151.312.000,00	1.130.796.083,00	98,22
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000,00	1.500.000,00	62,50
<b>5102</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.010.767.150,00</b>	<b>1.977.741.402,00</b>	98,36
510201	Belanja Barang	543.332.550,00	538.604.630,00	99,13
510202	Belanja Jasa	1.130.208.700,00	1.104.384.632,00	97,72
510203	Belanja Pemeliharaan	13.925.000,00	13.870.600,00	99,61
510204	Belanja Perjalanan Dinas	309.050.900,00	306.631.540,00	99,22
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	100
5105	Belanja Hibah	<b>29.705.021.845,00</b>	<b>29.678.869.845,00</b>	99,91
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.539.519.000,00	28.513.367.000,00	99,91
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.165.502.845,00	1.165.502.845,00	100

<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>695.770.000,00</b>	<b>686.739.000,00</b>	98,70
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	695.770.000,00	686.739.000,00	98,70
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.750.000,00	25.489.000,00	95,29
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.498.000,00	10.150.000,00	88,28
520210	Belanja Modal Komputer	657.522.000,00	651.100.000,00	99,02
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>35.183.499.721,00</b>	<b>35.072.474.457,00</b>	99,68
	Surplus (Defisit)	(35.183.499.721,00)	(35.072.474.457,00)	

Laporan realisasi anggaran yang tersaji diatas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2024 dengan anggaran Rp. 35.183.499.721,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasikan sebesar Rp. 35.072.474.457,00 atau terealisasi sebesar 99,68%. Komponen Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

#### **A. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Anggaran belanja operasi pada tahun 2024 Rp. 34.487.729.721,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.385.735.457,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol dengan anggaran Rp. 2.771.940.726,00 terealisasi sebesar Rp. 2.729.124.210,00 (98,45%).
2. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.010.767.150,00 terealisasi Rp 1.977.741.402,00 (98,35%), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja kegiatan bidang.
3. Belanja hibah. Anggaran belanja hibah Rp. 29.705.021.845,00 direalisasikan sebesar Rp. 29.678.869.845,00 (99,91%). penjelasan penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik sebesar Rp. 1.165.502.845,00
- b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 28.513.367.000,00 terdiri dari :
  - Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp. 150.000.000,00
  - Hibah uang kepada KPU tahap 2 (60%) Rp. 20.649.537.600,00
  - Hibah uang kepada Bawaslu tahap 2 (60%) Rp. 5.217.917.400,00
  - Hibah uang kepada Polres Rp 2.522.064.000,00 (sesuai NPHD) kemudian ada pengembalian sisa hibah Rp. 26.152.000,00

## **B. Belanja Modal**

Anggaran belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sebesar Rp. 695.770.000,00 terealisasi sebesar Rp. 683.739.000,00 (98,70%).

Dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, terdiri dari :
  - a. Belanja modal mebel (meja kursi tamu dan meja kursi karyawan) Rp. 18.800.000,00
  - b. Belanja modal alat pendingin (lemari es) Rp. 2.000.000,00
  - c. Belanja modal alat dapur (tabung gas LPG) Rp. 539.000,00
  - d. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Sound Portable) Rp. 4.150.000,00
2. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, terdiri dari:
  - a. Belanja modal peralatan studio audio (mic dan stand mic) Rp. 2.400.000,00
  - b. Belanja modal peralatan studio video dan film (kamera DSLR) Rp. 7.750.000,00
3. Belanja modal komputer terdiri dari :
  - a. Belanja modal personal computer
    - Belanja modal personal computer (60 buah laptop untuk dipinjam pakaikan kepada Bawaslu dan KPU) Rp. 514.500.000,00
    - Belanja modal personal computer (PC All in one) Rp. 10.500.000,00
  - b. Belanja modal peralatan personal computer

- Belanja modal printer (40 buah untuk dipinjam pakaikan ke KPU dan Bawaslu) Rp. 99.600.000,00
- Belanja modal printer (1 buah) Rp. 3.000.000,00
- c. Belanja modal peralatan komputer lainnya
  - Belanja modal interactive LED Display Rp 23.500.000,00

## 2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Pencapaian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024 didukung dari 6 program yang akan dijabarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.3**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasar Program dan Kegiatan**

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
<b>A.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>35.183.499.721</b>	<b>35.072.474.457</b>	<b>111.025.264</b>	<b>99,68</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>35.183.499.721</b>	<b>35.072.474.457</b>	<b>111.025.264</b>	<b>99,68</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA</b>	<b>3.374.715.726</b>	<b>3.303.761.112</b>	<b>70.954.614</b>	<b>97,89</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.769.540.726</b>	<b>2.727.624.210</b>	<b>41.916.516</b>	<b>98,48</b>
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.540.726	2.727.624.210	41.916.516	98,48
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	196.001.540	3.998.460	98,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	196.001.540	3.998.460	98,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>150.065.400</b>	<b>143.915.250</b>	<b>6.150.150</b>	<b>95,90</b>
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.998.700	1.300	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000	57.691.500	5.983.500	90,60
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	10.384.700	115.300	98,90

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.485.500	14.500	99,80
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000	10.464.550	35.450	99,66
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.890.400	54.890.300	100	99,99
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>203.609.600</b>	<b>186.202.382</b>	<b>17.407.218</b>	<b>91,45</b>
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.520.000	15.360.350	5.159.650	74,85
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.964.000	36.000	99,28
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600	165.878.032	12.211.568	93,14
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>51.500.000</b>	<b>50.017.730</b>	<b>1.482.270</b>	<b>97,12</b>
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	38.582.230	1.417.770	96,45
4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	3.943.500	56.500	98,58
4.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.492.000	8.000	99,89
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>565.000.000</b>	<b>559.748.500</b>	<b>5.251.50</b>	<b>99,07</b>
<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>565.000.000</b>	<b>559.748.500</b>	<b>5.251.500</b>	<b>99,07</b>

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	565.000.000	559.748.500	5.251.500	99,07
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>30.489.283.995</b>	<b>30.454.859.345</b>	<b>34.424.650</b>	<b>99,88</b>
<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>30.489.283.995</b>	<b>30.454.859.345</b>	<b>34.424.650</b>	<b>99,88</b>
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30.489.283.995	30.454.859.345	34.424.650	99,88
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	0	0	0	
1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	0	0	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>185.000.000</b>	<b>184.658.000</b>	<b>342.000</b>	<b>99,81</b>
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	<b>185.000.000</b>	<b>184.658.000</b>	<b>342.000</b>	<b>99,81</b>
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185.000.000	184.658.000	342.000	99,81
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>569.500.00</b>	<b>569.447.500</b>	<b>52.500</b>	<b>99,99</b>
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>569.500.00</b>	<b>569.447.500</b>	<b>52.500</b>	<b>99,99</b>

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	569.500.000	569.447.500	52.500	99,99
1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	0	0	0	

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada kendala yang berarti. Capaian kinerja keuangan yang tidak mencapai 100% adalah karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.



## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

##### 3.1.1. Pendapatan - LRA

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan pada laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil PAD.

##### 3.1.2. Belanja - LRA

Akun belanja - LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### 3.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Pagu anggaran belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sebesar Rp. 34.487.729.721,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.385.735.457,00. Belanja Operasi terbagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah; tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Uraian	2024		2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5101	Belanja Pegawai	2.771.940.726	2.729.124.210	2.747.335.294	2.726.301.322
5102	Belanja Barang Jasa	2.010.767.150	1.977.741.402	2.087.101.900	2.014.233.981
5105	Belanja Hibah	29.705.021.845	29.678.869.845	18.756.657.850	18.556.657.850
	Jumlah	34.487.729.721	34.385.735.457	23.591.095.044	23.297.193.153

Pagu anggaran belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 46,19% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024. Sedangkan untuk realisasinya mengalami peningkatan sebesar 59,93% bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

### 3.1.2.1.1 Belanja Pegawai - LRA

Pada Tahun 2024 anggaran belanja pegawai Rp. 2.771.940.726,00 terealisasi sebesar Rp. 2.729.124.210,00 ( 98,45%), anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol dan pembayaran honor pejabat pembuat komitmen. Sedangkan pada Tahun 2023 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.726.301.322,00 atau 99,23 % dari anggaran sebesar Rp.2.747.335.294,00.

**Tabel 3.1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Pegawai	2.771.940.726	2.729.124.210	98,46	2.726.301.322
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.618.228.726	1.596.828.127	98,68	1.622.943.022
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.151.312.000	1.130.796.083	98,22	1.102.108.300
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000	1.500.000	62,5	-

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena di tahun 2024 ada honor Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan barang jasa.

### 3.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa -LRA

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.010.767.150,00 terealisasi Rp 1.977.741.402,00 (98,36%), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2024**

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Barang Dan Jasa	2.010.767.150	1.977.741.402	98,35	2.014.233.981
1.	Belanja Barang	543.332.550	538.604.630	99,12	511.603.495
2.	Belanja Jasa	1.130.208.700	1.104.384.632	97,71	1.224.279.517
3.	Belanja Pemeliharaan	13.925.000	13.870.600	99,60	10.161.300
4.	Belanja Perjalanan Dinas	309.050.900	306.631.540	99,21	268.189.669
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	14.250.000	14.250.000	100	-

Terdapat penurunan realisasi belanja barang jasa di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Perbandingan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya dijabarkan dalam rekening belanja sebagai berikut :

1. Belanja barang ada kenaikan sebesar Rp. 27.001.135,00
2. Belanja jasa ada penurunan sebesar Rp. 119.894.885,00
3. Belanja pemeliharaan ada kenaikan sebesar Rp. 3.709.300,00
4. Belanja perjalanan dinas ada kenaikan sebesar Rp. 38.441.871,00
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat ada kenaikan sebesar Rp. 14.250.000,00

### **3.1.2.1.3 Belanja Hibah -LRA**

Anggaran belanja hibah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.705.021.845,00 terealisasi sebesar Rp. 29.678.869.845,00 ( 99,91%).

**Tabel 3.1.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah – LRA TA 2024**

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi(Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Hibah	29.705.021.845	29.678.869.845	99,91	18.556.657.850
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.539.519.000	28.513.367.000	99,90	17.419.970.000
2.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.165.502.845	1.165.502.845	100	1.136.687.850

Penjelasan penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp. 28.539.519.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.513.367.000,00. Dengan rincian realisasi sebagai berikut :
  - a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik sebesar Rp. 1.165.502.845,00
  - b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 28.513.367.000,00 terdiri dari :
    - Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Rp. 150.000.000,00
    - Hibah uang kepada KPU tahap 2 (60%) Rp. 20.649.537.600,00
    - Hibah uang kepada Bawaslu tahap 2 (60%) Rp. 5.217.917.400,00
    - Hibah uang kepada Polres Rp 2.522.064.000,00 (sesuai NPHD) kemudian ada pengembalian sisa hibah Rp. 26.152.000,00 (bukti pengembalian ke RKUD terlampir)
2. Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang duduk di kursi DPRD Kab Temanggung sebesar Rp. 1.165.502.845,00. Ada kenaikan sebesar Rp. 28.814.995,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, hal ini karena adanya perubahan jumlah suara yang disesuaikan dengan hasil pemilu legislatif tahun 2024.

### 3.1.3. Pendapatan - LO

Tidak ada pendapatan - LO.

### 3.1.4. Beban - LO

Tabel 3.1.5

Rincian Beban-LO per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>34.593.095.478,00</b>	<b>23.547.369.482,72</b>	<b>11.045.725.995,28</b>
1.	Beban Operasi	34.593.095.478,00	23.547.369.482,72	11.045.725.995,28
1.a	Beban Pegawai	2.736.092.260,00	2.726.811.060,00	9.281.200,00
1.b	Beban Barang dan Jasa	1.979.612.536,00	2.014.119.975,00	(34.507.439,00)
1.c	Beban Hibah	29.678.869.845,00	18.556.657.850,00	11.122.211.995,00
1.d	Beban penyusutan dan Amortisasi	198.520.837,00	249.780.597,72	(51.259.760,72)
	Jumlah Beban	34.593.095.478,0	23.547.369.482,72	11.045.725.995,28
	<b>Surplus Defisit LO</b>	<b>(34.593.095.478)</b>	<b>(23.547.369.482,72)</b>	<b>(11.045.725.995,28)</b>

Beban Daerah Tahun 2024 Rp 34.593.095.478,00 meningkat Rp 11.045.725.995,28 dari Beban Daerah Tahun 2023. Beban Daerah Tahun 2024 terdiri dari Beban Operasi; yang terbagi menjadi empat yaitu Beban pegawai, Beban barang dan jasa, Beban Hibah, Beban penyusutan dan amortisasi.

#### 1. Beban Pegawai

Beban pegawai sebesar Rp. 2.736.092.260,00 berasal dari beban pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.596.828.127,00 ; Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 1.137.764.133,00 dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 1.500.000,00

#### 2. Beban Barang Jasa

Beban barang jasa sejumlah Rp. 1.979.612.536,00 berasal dari beban barang Rp. 537.811.330,00, beban jasa Rp. 1.107.049.066,00, beban pemeliharaan

Rp.13.870.600,00, beban perjalanan dinas Rp. 306.631.540,00 dan beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 14.250.000,00.

3. Beban Hibah

Beban hibah sebesar Rp. 29.678.869.845,00 digunakan untuk Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 28.513.367.000,00 ; Beban hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.165.502.845,00.

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi berjumlah Rp. 198.520.837,00 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 175.829.600,00 ; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 21.444.487,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 1.246.750,00.

**3.1.5. ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.740.666.558,50 yang tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.1.6**  
**Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	<b>ASET</b>	<b>1.740.666.558,50</b>	<b>1.871.347.952,62</b>	<b>(130.681.394,12)</b>
1.	Aset Lancar	905.800,00	112.500,00	793.300,00
2.	Aset Tetap	1.738.260.758,50	1.871.235.452,62	(132.974.694,12)

### 3.1.5.1 ASET LANCAR

Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 905.800,00. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 793.300,00 dari tahun anggaran sebelumnya yang dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.7**  
**Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	<b>ASET LANCAR</b>			
1.	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
2.	Persediaan	905.800,00	112.500,00	793.300,00

Penjelasan :

#### 1. Kas dan Setara Kas

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	<u>0,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kas dan Setara Kas	Saldo
1	Kas di Bank	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
	<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>

##### a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 ( Nol Rupiah )

##### b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00 ( Nol Rupiah )

## 2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2024 senilai Rp 905.800,00. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekening	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Tulis Kantor	529.500,00	2.500,00	527.000,00
2	Kertas dan Cover	333.800,00	110.000,00	223.800,00
3	Perabot Kantor	42.500,00	0,00	42.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>905.800,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>793.300,00</b>

### 3.1.5.2 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan.

#### 1. Tanah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

2. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan



jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

**Tabel 3.1.8**  
**Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Jenis Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan Penurunan
1301	Tanah	442.000.000,00	442.000.000,00	0,00
1302	Peralatan dan Mesin	1.621.883.467,00	2.294.204.467,00	(672.321.000)
1303	Gedung dan Bangunan	1.072.224.350,00	1.072.224.350,00	0,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.620.000,00	49.620.000,00	0,00

1305	Aset tetap lainnya	200.000,00	10.700.000,00	(10.500.000)
1307	Akumulasi Penyusutan	(1.447.667.058,50)	(1.997.513.364,38)	(549.846.305,80)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.078.506.079,50)	(1.642.043.622,38)	(563.537.542,88)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(357.293.604,00)	(335.849.117,00)	21.444.487)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(11.867.375,00)	(10.620.625,00)	1.246.750
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(9.000.000,00)	(9.000.000)
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.738.260.758,50</b>	<b>1.871.347.952,62</b>	<b>(133.087.194,12)</b>

**Penjelasan :**

- Nilai aset tetap Tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 442.000.000,00. Tidak ada perubahan pada nilai aset tetap Tanah.
- Aset tetap Peralatan dan mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.621.883.467,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.294.204.467,00. Ada penurunan nilai aset sebesar Rp. 672.321.000,00. Perubahan nilai ini disebabkan karena adanya mutasi keluar dan mutasi masuk aset peralatan dan mesin serta adanya pengadaan aset tetap (belanja modal) selama tahun 2024. Data aset yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

**A. Alat Angkutan**

Jenis Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
Alat Angkutan	591.386.467,00	1.949.546.467,00	(1.358.160.000)

Penjelasan :

1. Mutasi keluar aset kendaraan dinas Toyota Fortuner sebanyak 3 (tiga) buah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diserahkan ke Sekretariat Daerah Kab Temanggung senilai Rp. 1.443.850.000,00
2. Mutasi keluar aset kendaraan dinas Avanza dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung diserahkan ke Sekretariat Daerah Kab Temanggung senilai Rp. 108.000.000,00
3. Mutasi masuk aset kendaraan dinas Chevrolet Spin dari Bappeda diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp. 193.690.000,00

B. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Jenis Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
Alat Kantor dan Rumah Tangga	175.615.000,00	150.126.000,00	25.489.000,00

Penjelasan :

1. Penambahan aset mebelair berupa meja kursi tamu sebanyak 2 set @ Rp. 7.200.000,00 total Rp. 14.400.000,00
2. Penambahan aset mebelair berupa meja kursi kantor sebanyak 2 set @ Rp. 2.200.000,00 total Rp. 4.400.000,00
3. Penambahan aset berupa kulkas sebanyak 1 unit Rp. 2.000.000,000
4. Penambahan aset alat dapur berupa tabung gas 12 kg Rp. 539.000,00
5. Penambahan aset alat rumah tangga lainnya (home use) berupa Sound system portable sebanyak 1 buah Rp. 4.150.000,00

C. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Jenis Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.758.750,00	50.008.750,00	32.750.000,00

Penjelasan :

1. Penambahan aset berupa Mic sebanyak 2 buah @ Rp. 750.000,00 total Rp. 1.500.000,00
2. Penambahan aset berupa Kamera DSLR sebanyak 1 buah Rp. 7.750.000,00
3. Penambahan Interactive LED Display Rp 23.500.000,00

#### D. Komputer

Jenis Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
Komputer	763.289.750,00	135.689.750,00	627.600.000,00

Penjelasan :

1. Penambahan aset melalui pengadaan belanja modal PC Dekstop All in One sebanyak 1 unit Rp 10.500.000,00
  2. Penambahan aset melalui pengadan belanja modal Laptop sebanyak 60 buah @ Rp. 8.575.000, total Rp 514.500.000,00. Aset laptop tersebut dipinjam pakaikan ke KPU dan Bawaslu selama masa pemilu/pemilukada.
  3. Penambahan aset melalui pengadan belanja modal Printer Rp. 99.600.000,00 untuk dipinjam pakaikan ke KPU dan Bawaslu selama masa pemilu/pemilukada
  4. Penambahan aset Printer untuk operasional kan Rp. 3.000.000,00
- Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar 1.072.224.350 dan pada tahun 2023 sebesar 1.072.224.350,00. Tidak ada penambahan gedung dan bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2024
- Aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 49.620.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 49.620.000,00. Tidak ada penambahan pada jalan, jaringan, dan irigasi selama tahun 2024.
- Aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp. 200.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 10.700.000,00. Terjadi penurunan nilai sebesar Rp. 10.500.000,00 karena ada reklas / perubahan klasifikasi rekening dari aset tetap lainnya ke aset lainnya yang terdiri dari :
1. Bahan perpustakaan tercetak (buku sejarah Temanggung)  
Rp. 1.500.000,00
  2. Alat bercorak kebudayaan (maket miniatur, replika)  
Rp. 9.000.000,00
- Akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar Rp. (1.447.667.058,50)
- Akumulasi penyusutan aset terdiri dari :
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. (1.078.506.079,50)
  2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. (357.293.604,00)
  3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. (11.867.375,00)

#### 4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Jumlah total keseluruhan aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.738.260.758,50 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.871.235.452,62. Terdapat penurunan sebesar Rp. 132.974.694,12. Penurunan ini disebabkan karena adanya mutasi keluar aset tetap dan penyusutan aset.

### 3.1.5.3 ASET LAINNYA

Di tahun 2024 terdapat reklas / perubahan klasifikasi rekening dari aset tetap lainnya ke aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan perpustakaan tercetak (buku sejarah Temanggung) Rp. 1.500.000,00
2. Alat bercorak kebudayaan (maket miniatur, replika) Rp. 9.000.000,00
3. Penyusutan aset lainnya Rp. 9.000.000,00

Kode Rekening	Jenis Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
15	Aset lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
150401	Aset Lain-lain	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(9.000.000,00)	(9.000.000)

### 3.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Tabel 3.1.9**  
**Saldo Kewajiban-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Jenis Kewajiban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
21	Kewajiban jangka pendek	105.120.723,00	96.388.239,00	8.732.484,00

2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	105.120.723,00	96.388.239,00	8.732.484,00

### 3.1.6.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang PPh Pusat Rp 0,00
2. Utang PPN Pusat Rp 0,00
3. Utang Pajak Daerah Rp 0,00

### 3.1.6.2 Utang Belanja

Utang belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.10**  
**Saldo Utang Belanja - Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Jenis Utang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
2106	Utang Belanja	105.120.723,00	96.388.239,00	8.732.484,00
210601	Utang Belanja Pegawai	89.807.964,00	82.839.914,00	6.968.050
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	89.807.964,00	81.270.914,00	8.537.050
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		1.569.000,00	(1.569.000)
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	15.312.759	13.548.325,00	1.764.434
	Utang belanja jasa tenaga kebersihan	2.000.000	1.750.000,00	250.000,00
	Utang belanja jasa tenaga keamanan	12.000.000	10.500.000,00	1.500.000,00

	Utang belanja tagihan telepon	34.857	35.412,00	555
	Utang belanja tagihan Air	110.200	101.600,00	8.600
	Utang belanja tagihan Listrik	487.491	487.540,00	(49)
	Utang belanja kawat/faksimili/internet	680.211	673.773,00	6.438,00

Penjelasan :

1. Utang belanja pegawai yang terdiri dari utang belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebesar Rp. 89.807.964,00 meningkat sebesar Rp 6.968.050,00 bila dibandingkan dengan utang belanja pegawai tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 82.330.176,00.
2. Utang belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp. 15.312.759,00 naik sebesar Rp 1.764.434,00 bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 13.548.325,00 . Alasan kenaikan utang belanja barang dan jasa adalah karena penyesuaian gaji tenaga keamanan dan kebersihan mendekati UMR. Adapun perincian utang belanja barang dan jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - 2.1 Utang belanja jasa tenaga kebersihan  
Merupakan utang pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang petugas kebersihan di bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 sebesar Rp. 2.000.000,00
  - 2.2 Utang belanja jasa tenaga keamanan  
Merupakan utang pembayaran jasa tenaga keamanan kantor sebanyak 6 orang petugas keamanan di bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 sebesar Rp 12.000.000,00.
  - 2.3 Utang belanja tagihan telepon, air, listrik, dan internet  
Merupakan utang belanja pembayaran langganan, telepon, air, dan internet pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024.

### 3.1.7. Ekuitas Dana

**Tabel 3.1.11**  
**Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>1.774.959.713,62</b>	<b>2.243.925.656,06</b>
2.	Surplus / (Defisit) LO	(34.593.095.478,00)	(6.285.151.714,72)
3.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(618.792.857,12)	12.608.575,00
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	35.072.474.457,00	6.053.830.887
5.	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>1.635.545.835,50</b>	<b>2.025.213.403,34</b>

### 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Pada tahun 2024 Badan Kesbangpol memiliki utang sebesar Rp. 105.120.723,00.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,00
- b. Utang Belanja sebesar Rp 105.120.723,00
  - Utang Belanja Pegawai Rp.89.807.964,00
  - Utang Belanja Barang & Jasa Rp. 15.312.759,00

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual.



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

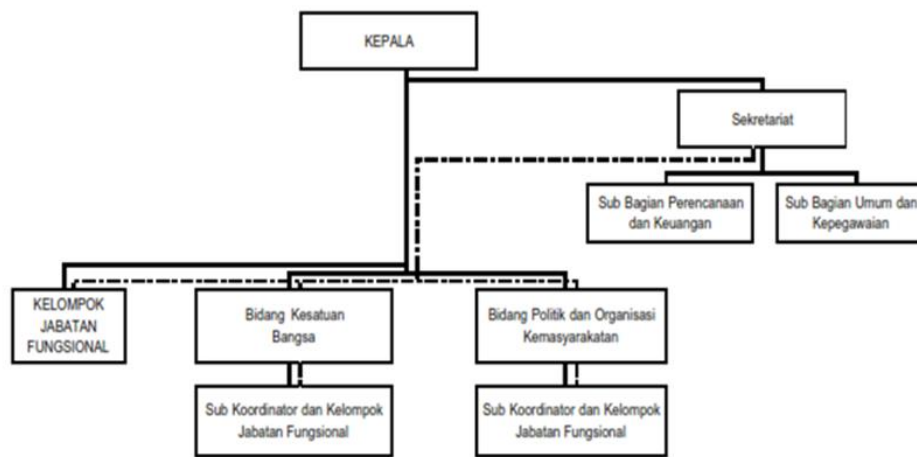
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

**Struktur Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ



Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris badan yang membawahi:
  - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa
  - 3.1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- 3.2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- 4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
  - 4.1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  - 4.2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

**BAB V**  
**PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

